

## DAMPAK EKONOMI NEOLIBERAL TERHADAP SISTEM DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Muhammad Farhan Ferdino<sup>1\*</sup>, Muhammad Sirozi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia

\*Email: [mfarhanferdino\\_24052160026@radenfatah.ac.id](mailto:mfarhanferdino_24052160026@radenfatah.ac.id)

Diterima: 25 Februari 2025. Disetujui: 15 April 2025. Dipublikasikan: 21 April 2025

**Abstrak:** Neoliberalisme, yang menekankan pasar bebas, privatisasi, dan efisiensi, telah memengaruhi berbagai aspek pendidikan, mulai dari kebijakan hingga praktik kelembagaan. Penerapan ekonomi neoliberal telah menyebabkan marketisasi pendidikan, pengurangan pendanaan publik, komodifikasi pengetahuan, dan meningkatnya ketimpangan akses terhadap pendidikan. Artikel ini membahas dampak ideologi neoliberal terhadap sistem dan tata kelola pendidikan di Indonesia, dimulai dari konsep dasarnya, penerapannya, hingga implikasi positif dan negatif, termasuk dampak jangka panjangnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, dan hasilnya dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan temuan utama. Studi ini menunjukkan bahwa neoliberalisme telah menggeser pendidikan dari hak publik menjadi komoditas ekonomi, memperlebar kesenjangan sosial, serta melemahkan peran negara dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan merata, sehingga terjadinya tekanan biaya dan persaingan yang dihasilkan dari sistem ini tentunya berdampak pada kondisi psikologis siswa dan keluarga. Namun, globalisasi dan sistem pemerintahan yang demokratis juga membawa peluang positif, seperti meningkatnya transparansi, pengembangan kurikulum yang adaptif, dan modernisasi infrastruktur pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus tetap menjadi alat pemberdayaan dan mobilitas sosial, bukan sarana pelanggeng ketimpangan. Hal ini penting untuk mereposisi kebijakan pendidikan nasional agar lebih inklusif, berpihak pada kelompok rentan, dan berfokus pada pembangunan manusia yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** dampak, ekonomi neoliberal, sistem, pendidikan, Indonesia

### PENDAHULUAN

Neoliberalisme merupakan suatu paham ideologis yang berakar pada nilai budaya, yang menekankan pentingnya individualisme serta dominasi mekanisme pasar bebas, dan telah memberikan dampak besar terhadap sistem pendidikan di era globalisasi. Konsekuensi dari hal ini ialah munculnya privatisasi lembaga pendidikan, pergeseran peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan, serta terbentuknya generasi muda dengan cara pandang yang dipengaruhi nilai-nilai neoliberal [1]. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, arus transformasi pendidikan tinggi berbasis neoliberal berkembang semakin pesat, khususnya sejak diterapkannya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.

Kemajuan suatu negara tidak lagi semata-mata bergantung pada kekayaan sumber daya alam (SDA), melainkan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Di sejumlah negara maju yang juga memiliki sumber daya alam, kemajuan mereka dicapai melalui strategi penguatan dan pengembangan sumber daya manusia. Pola pertumbuhan di negara-negara tersebut menjadikan SDM sebagai aset utama, yang jika meningkat, akan menghasilkan produktivitas tinggi; produktivitas yang tinggi ini kemudian menciptakan keuntungan besar yang memungkinkan peningkatan investasi, sehingga pembangunan SDM semakin optimal, mendorong produksi yang lebih besar, dan pada akhirnya menghasilkan kemajuan yang semakin tinggi.

Sebelum pengaruh ekonomi neoliberal menguat, sistem pendidikan nasional di Indonesia pada umumnya

masih sangat bergantung pada negara sebagai aktor utama. Pemerintah bertindak sebagai penanggung jawab dalam penyusunan kurikulum, penyediaan anggaran, serta pemerataan akses pendidikan. Pendidikan diposisikan sebagai hak sosial yang dijamin oleh negara, bukan sebagai komoditas ekonomi. Lembaga pendidikan negeri memegang peran dominan, dan orientasi pendidikan lebih menekankan pada pembangunan karakter serta nilai-nilai kebangsaan, bukan pada efisiensi pasar atau kompetisi antar lembaga.

Pengaruh tersebut ke dalam dunia pendidikan, neoliberalisme terlihat dari adanya perubahan yang mendasar dalam mekanisme pengaturan, pendanaan, serta pelaksanaan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, dampak neoliberalisme tampak jelas pada cara pendidikan dikelola, didanai, dan dijalankan. Ideologi ini memberi pengaruh signifikan terhadap struktur organisasi, sistem pendanaan, dan praktik operasional pendidikan, yang secara umum mendorong pergeseran orientasi perguruan tinggi menuju pada efisiensi kinerja dan ekonomi berbasis pengetahuan.[2].

Hasil dari kerja sama tersebut mendorong adanya pengembangan dalam sistem pendidikan serta memperluas wawasan mengenai pendidikan multikultural. Namun demikian, apabila negara-negara berkembang menunjukkan sikap inferior yang berlebihan terhadap negara maju yang dianggap sebagai simbol kemajuan dan modernitas, hal tersebut dapat menimbulkan krisis identitas nasional. Selain itu, ketergantungan yang terlalu lama dan berlebihan terhadap sistem pendidikan dari negara-negara Barat tanpa adanya usaha pembaruan dari dalam negeri dapat membuka

jalan bagi masuknya dominasi budaya asing. Akibatnya, arus budaya luar berkembang dengan pesat di Indonesia, dan bahkan di kalangan generasi muda mulai tampak dengan jelas adanya pergeseran sosial-budaya yang mencerminkan gaya hidup ala Barat [3].

Neoliberalisme dalam ranah pendidikan, dapat dilihat dari perubahan mendasar dalam pengelolaan, pembiayaan, dan pelaksanaan sistem pendidikan. Neoliberalisme secara signifikan memengaruhi struktur organisasi, sumber pendanaan, serta operasional pendidikan, yang kemudian menggeser peran institusi pendidikan tinggi menjadi lebih berorientasi pada performa dan ekonomi berbasis pengetahuan [4]. Konsekuensi dari hal ini adalah terjadinya korporatisasi lembaga pendidikan, dengan titik tekan pada program pelatihan guru yang instan serta munculnya pasar baru dalam pelatihan tenaga pendidik.

Agenda neoliberal juga membawa pengaruh terhadap restrukturisasi kebijakan pendidikan, yang berdampak pada menurunnya profesionalisme tenaga pendidik dan lemahnya tata kelola pendidikan lokal, serta memunculkan dampak negatif terhadap proses pembelajaran di tingkat siswa, guru, dan satuan pendidikan. Munculnya pengaruh neoliberal telah mengubah fungsi sekolah dan perguruan tinggi menjadi seperti perusahaan, meningkatkan tekanan terhadap performa guru, dan berdampak langsung pada basis pengetahuan pendidikan itu sendiri [5].

Hal tersebut menunjukkan bahwa, pada dasarnya terdapat pemaknaan terhadap pendidikan yang kerap menjadi bahan perdebatan. Pertama, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pelestarian, pengalihan, serta internalisasi perilaku individu dan sosial yang telah menjadi acuan tetap dalam masyarakat. Kedua, terdapat pula pandangan yang mengartikan pendidikan sebagai suatu proses fasilitasi yang bertujuan menciptakan kondisi atau lingkungan yang memungkinkan berkembangnya berbagai potensi yang dimiliki peserta didik, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman di mana mereka harus bertahan dan beradaptasi [6].

Dua pandangan yang berbeda mengenai makna pendidikan ini masing-masing memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan pendidikan dalam praktik selama ini. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam saat ini, tampaknya pemahaman yang merujuk pada pandangan “pertama” masih lebih dominan dibandingkan dengan pemaknaan yang “kedua”. Akibatnya, pendidikan lebih sering dipahami sebagai proses membentuk peserta didik agar sesuai dengan suatu figur ideal yang bersifat tetap dan tidak berubah. Sebaliknya, apabila pendekatan yang “kedua” lebih diberi ruang, maka akan terbuka kemungkinan yang lebih besar bagi peserta didik untuk mengeksplorasi dan membentuk identitas dirinya sendiri secara lebih otentik, sesuai dengan kondisi lingkungan dan zaman tempat mereka berada dan akan menjalani peran kehidupannya.[7].

Disimpulkan bahwa, dampak neoliberalisme terhadap tata kelola pendidikan di Indonesia tidak dapat diabaikan begitu saja. Proses privatisasi, komersialisasi, serta peralihan peran pendidikan dari layanan publik menjadi barang dagangan telah mengubah arah dan cara kerja institusi pendidikan. Pendidikan kini tidak sepenuhnya berfokus pada pembentukan nilai dan karakter, melainkan semakin dikendalikan oleh prinsip-prinsip pasar dan efisiensi. Situasi semacam ini berpotensi mengurangi peran negara dalam menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh masyarakat, sekaligus menimbulkan risiko krisis identitas di kalangan generasi muda akibat dominasi budaya asing yang semakin kuat. Ketergantungan yang tinggi terhadap sistem dan kebijakan pendidikan dari negara-negara maju juga dapat menghambat kemandirian sistem pendidikan nasional, khususnya bila tidak disesuaikan dengan nilai-nilai serta konteks lokal yang relevan.

Melihat realitas tersebut, muncul pertanyaan kritis, apakah sistem pendidikan di Indonesia saat ini benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat atau justru lebih menguntungkan logika pasar, disatu pihak, pendekatan neoliberal dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendidikan. Namun pada pihak lain, pendekatan ini juga berisiko memperbesar kesenjangan sosial dalam memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu, kajian yang lebih mendalam sangat diperlukan untuk memahami implikasi ekonomi neoliberal terhadap sistem pendidikan Indonesia, demi merumuskan kebijakan alternatif yang lebih adil dan merata.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif karena tidak menggunakan data statistik, melainkan memusatkan perhatian pada proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data[8]. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang mencakup berbagai sumber literatur seperti artikel ilmiah, buku, catatan, serta referensi lainnya yang berasal dari karya-karya terdahulu [9].

Penelitian ini analisis datanya menggunakan metode deskriptif, di mana data yang diperoleh dikaji secara mendalam, disusun, diorganisasi, dan ditentukan guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan menghasilkan wawasan baru. Hasil dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan hasil temuan penelitian. Tahapan ini mencakup proses klasifikasi serta identifikasi pola dan hubungan yang terdapat dalam kategori yang relevan terhadap objek penelitian. Adapun metode pengumpulan data lainnya yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu dengan mengandalkan dokumen-dokumen relevan tanpa melibatkan observasi langsung di lapangan. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen literatur ilmiah, baik berupa buku maupun artikel jurnal yang membahas mengenai Dampak Ekonomi Neoliberal terhadap Sistem dan Tata Kelola Pendidikan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Dasar Ekonomi Neoliberal Terhadap Pendidikan

Pada dasarnya, idealisme liberal merupakan hasil dari proses modernisasi di dunia Barat, yang telah menggantikan pola pikir tradisional di mana cara berpikir manusia sebelumnya dikendalikan oleh kekuatan di luar dirinya. Salah satu gagasan utama dalam modernisme adalah pencerahan (enlightenment), yakni proses pembebasan kesadaran dari ikatan adat dan budaya yang membatasi pemikiran manusia selama berabad-abad.

Pemikiran liberal dapat dirumuskan dalam enam prinsip utama sebagaimana dikemukakan oleh Julio Teehankee, seorang pemikir liberal dari Filipina. *Pertama*, individualisme; di mana kaum liberal memandang individu sebagai entitas yang sangat penting. Seluruh kebijakan dalam kerangka liberal ditujukan untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi kebebasan dan hak individu. Bagi kaum liberal, individualisme memiliki posisi yang lebih utama dibandingkan dengan kolektivitas. *Kedua*, rasionalisme; kaum liberal meyakini bahwa dunia memiliki struktur yang rasional dan dapat dipahami melalui nalar logis. Keteraturan dalam kehidupan diyakini dapat dijelaskan melalui penalaran dan pencarian kritis yang terus-menerus. *Ketiga*, kebebasan; tidak ada konsep yang lebih sentral dalam liberalisme selain kebebasan. Kebebasan dimaknai sebagai kemampuan untuk berpikir dan bertindak berdasarkan suara hati dan kehendak pribadi. Seluruh dasar pemikiran liberal bersumber dari keyakinan atas kebebasan manusia.

*Keempat*, tanggung jawab; kebebasan tanpa disertai tanggung jawab hanya akan menghasilkan kebebasan yang tidak terkendali. Banyak orang keliru menafsirkan liberalisme sebagai bentuk kebebasan yang liar. Padahal, hakikat liberalisme adalah kebebasan yang disertai dengan rasa tanggung jawab. *Kelima*, keadilan; kaum liberal meyakini bahwa keadilan merupakan nilai moral yang harus dijunjung tinggi. Keadilan tidak berarti mengorbankan hak seseorang demi membela hak orang lain, tetapi memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk bersaing dan memperoleh haknya. *Keenam*, toleransi; yaitu sikap menerima dan menghargai pandangan atau tindakan orang lain, meskipun pandangan atau tindakan tersebut belum tentu disetujui. Toleransi menjadi pondasi bagi terciptanya kehidupan yang harmonis dan penuh kebersamaan. Tanpa adanya toleransi, konsep kebebasan tidak dapat diwujudkan secara utuh [10].

Di balik penekanan liberalisme terhadap kebebasan individu dalam menentukan sendiri konsep tentang kebaikan, terdapat kelemahan yang cukup mendasar, yakni ketidakmampuannya dalam mengatasi kebebasan yang tidak terarah, di mana individu kehilangan pedoman dalam menentukan pilihan. Kebebasan ini kerap ditekan oleh rasionalisasi, dorongan konsumtif, serta dominasi kekuasaan yang

dipaksakan secara sosial. Karena alasan inilah, Ross Poole menyimpulkan bahwa liberalisme pada akhirnya cenderung menuju nihilisme. Sementara itu, neoliberalisme sendiri merupakan bentuk lanjutan dari kapitalisme liberal, yaitu paham liberalisme yang telah bergeser ke ranah ekonomi dengan menekankan pasar bebas. Ideologi ini membatasi campur tangan negara dalam mengatur pasar serta mengekang peran pengawasan oleh pemerintah [11].

Kaitannya dengan pendidikan bahwa dalam ekonomi neoliberal, pendidikan mengalami penyempitan makna, yang dimana terbatas hanya pada pemenuhan tuntutan dunia bisnis dan industri, sementara tujuan-tujuan pendidikan yang lebih mendalam dan menyeluruh diabaikan. Aktivitas menghafal dianggap lebih bernilai dibandingkan kemampuan menganalisis melalui pemikiran kritis. Sikap patuh lebih dihargai dibandingkan daya cipta atau kreativitas. Persaingan yang bersifat menjatuhkan dinilai lebih penting daripada kerja sama yang dilandasi semangat solidaritas [12]. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak lagi dianggap sebagai tanggung jawab negara semata, melainkan sebagai bagian dari sektor jasa yang dapat bersaing secara bebas. Prinsip utama neoliberalisme, seperti efisiensi, persaingan, privatisasi, dan deregulasi, menjadi acuan dalam mengatur sistem pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai investasi individu untuk meningkatkan nilai produktivitas ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan diarahkan untuk beroperasi secara profesional layaknya korporasi, yang harus efisien, kompetitif, dan mampu menarik “konsumen” (siswa dan mahasiswa) melalui layanan dan mutu yang menjual.

Dengan demikian, idealisme liberal lahir dari modernisasi Barat yang menekankan pencerahan dan pembebasan pikiran manusia dari belenggu tradisi. Liberalisme mengedepankan enam prinsip utama: individualisme, rasionalisme, kebebasan, tanggung jawab, keadilan, dan toleransi. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan masyarakat yang menghargai hak individu dan menjunjung kebebasan. Namun, dalam praktiknya, liberalisme juga menghadapi kritik karena dianggap mengarah pada kekosongan nilai dan dominasi rasionalisasi sosial. Neoliberalisme sebagai bentuk turunan liberalisme di bidang ekonomi lebih menekankan pada pasar bebas dan minimnya intervensi negara, yang pada akhirnya menggeser peran pemerintah dan memperkuat dominasi kekuatan ekonomi global. Sehingga dalam pendidikan, neoliberalisme telah menyempitkan makna pendidikan menjadi sekadar alat pemenuhan kebutuhan industri. Nilai-nilai kritis, kolaboratif, dan kemanusiaan tergeser oleh efisiensi, kompetisi, dan logika pasar. Pendidikan diposisikan sebagai komoditas, bukan lagi sebagai hak sosial, dan lembaga pendidikan beroperasi layaknya korporasi yang mengejar keuntungan serta daya saing.

## 2. Neoliberalisme dalam Penerapannya pada Pendidikan di Indonesia

Implementasi prinsip-prinsip neoliberal dalam dunia pendidikan telah melahirkan sejumlah konsekuensi, seperti komersialisasi pendidikan, penerapan tes yang terstandarisasi, kebijakan pilihan sekolah, pengurangan dukungan dana dari pemerintah, penekanan pada pendidikan kejuruan dan bidang STEM, komodifikasi ilmu pengetahuan, deregulasi serta privatisasi sektor pendidikan, hingga peningkatan beban utang bagi siswa. Serangkaian perubahan ini memberikan dampak signifikan terhadap mutu dan keterjangkauan pendidikan, di mana sejumlah studi menunjukkan bahwa perubahan-perubahan tersebut telah merusak pencapaian akademik dan memperbesar ketimpangan dalam dunia pendidikan. Dalam konteks Indonesia sendiri, neoliberalisme turut memengaruhi berbagai dimensi dalam sistem pendidikan [13].

*Pertama*, marketisasi pendidikan. Marketisasi pendidikan mengacu pada perlakuan terhadap pendidikan sebagai suatu sistem pasar yang kompetitif. Dalam kerangka neoliberal, lembaga pendidikan berlomba-lomba untuk menarik peserta didik, yang kerap kali diwujudkan melalui strategi pemasaran serta persaingan dalam menyusun program pendidikan yang dianggap menarik. Meskipun pendekatan ini berpotensi memacu inovasi, namun di sisi lain dapat memperdalam ketimpangan, sebab sekolah-sekolah dengan kekuatan finansial yang besar akan semakin berkembang, sedangkan sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan dana cenderung tersisih. Akibatnya, sebagian besar masyarakat di Indonesia yang tidak memiliki pendapatan tetap dan memadai mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan bermutu [14].

*Kedua*, penerapan tes terstandarisasi, termasuk di dalamnya tes bakat dan tes prestasi sesuai dengan fungsi masing-masing. Tes bakat berfungsi untuk memperkirakan potensi capaian atau hasil dari proses pembelajaran yang akan berlangsung, sedangkan tes prestasi dimaksudkan untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil dari proses pembelajaran yang telah dilalui. Meski demikian, tes prestasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk memproyeksikan hasil belajar di masa mendatang. Jenis tes ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana siswa, sekolah, atau wilayah tertentu telah mencapai standar tertentu jika dibandingkan dengan kelompok norma. Contoh nyata dari bentuk tes seperti ini adalah Ujian Nasional [15].

*Ketiga*, kebijakan pilihan sekolah (*school choice*), yakni kebijakan yang memberi keleluasaan bagi orang tua dalam menentukan sekolah untuk anak mereka melalui sistem voucher pendidikan atau melalui sekolah swasta yang berbasis publik, dengan tujuan menciptakan suasana persaingan. Biasanya kebijakan ini diterapkan melalui berbagai skema seperti voucher pendidikan, pendanaan langsung kepada siswa, atau pengelolaan sekolah swasta dengan dana publik. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan kompetisi sehat antar

sekolah guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan, mengikuti logika pasar bebas di mana sekolah bersaing untuk menarik "konsumen", yaitu siswa dan orang tua. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini sering kali memperluas kesenjangan sosial. Sekolah-sekolah unggulan menjadi semakin mudah diakses oleh kelompok elit, sementara sekolah di daerah terpencil atau yang melayani masyarakat miskin justru makin terpinggirkan.

*Keempat*, pengurangan alokasi dana dari pemerintah. Dalam kerangka neoliberalisme, terdapat dorongan untuk mengurangi peran negara, termasuk dalam hal pembiayaan sektor pendidikan yang dikenal dengan istilah *retrenchment*, yaitu penarikan peran negara dari tanggung jawab pendanaan publik. Pemerintah mulai memangkas subsidi serta dukungan anggaran untuk pendidikan dengan dalih efisiensi fiskal, penghematan biaya, dan pelimpahan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atau pihak swasta. Akibat dari penurunan pendanaan ini, banyak institusi pendidikan yang akhirnya menaikkan biaya operasional pendidikan guna menutupi kekurangan anggaran. Situasi ini menjadi beban tambahan bagi peserta didik dan orang tua, khususnya dari kelompok ekonomi bawah, sehingga memperbesar kesenjangan dalam mengakses layanan pendidikan yang bermutu.

*Kelima*, penekanan pada pendidikan vokasional dan STEM. Salah satu ciri khas dari sistem pendidikan yang terpengaruh oleh ideologi neoliberal adalah pergeseran arah kurikulum menuju bidang-bidang yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam hal ini, perhatian utama diarahkan pada pendidikan kejuruan (*vocational education*) serta bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*). Pendidikan kejuruan dan STEM dianggap sebagai sarana strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional karena dinilai mampu mencetak tenaga kerja siap pakai yang sesuai dengan tuntutan pasar. Dalam perspektif neoliberal, pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai proses pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan bersaing secara ekonomi. Di Indonesia, kebijakan seperti *link and match* antara dunia pendidikan dan sektor industri, serta penguatan program di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), menjadi contoh konkret dari arah kebijakan ini [16].

*Keenam*, komodifikasi pengetahuan, yaitu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai barang dagangan dalam pasar global. Hal ini berpotensi terjadi karena pendidikan sejatinya tidak hanya merupakan proses transfer pengetahuan, tetapi juga sarana penyampaian nilai-nilai dan keyakinan (doktrin) [17]. Agenda neoliberal yang digerakkan oleh kelompok kapitalis telah mendorong privatisasi institusi-institusi publik, termasuk lembaga pendidikan. Akibatnya, terjadi pergeseran fokus dalam pendidikan tinggi, dari pengembangan pribadi dan intelektual ke arah

pertimbangan ekonomi dan pembentukan keterampilan kewirausahaan. Hal ini menyebabkan orientasi utama pendidikan adalah menyiapkan siswa untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, yang sering kali mengesampingkan pengembangan diri secara menyeluruh dan pemahaman mendalam terhadap potensi siswa itu sendiri.

*Ketujuh*, deregulasi dan privatisasi dalam sektor pendidikan. Dalam perspektif neoliberal, kedua strategi ini menjadi langkah utama untuk mengurangi dominasi peran negara sekaligus memberikan peluang seluas-luasnya bagi sektor swasta dalam menjalankan fungsi pendidikan. Deregulasi mengacu pada pelonggaran bahkan penghapusan sejumlah regulasi pemerintah yang dianggap menghambat berjalannya mekanisme pasar. Sementara itu, privatisasi merujuk pada proses pengalihan tanggung jawab pengelolaan serta pendanaan pendidikan dari pemerintah kepada individu atau institusi swasta. Privatisasi dipandang sebagai cara untuk mengurangi beban fiskal negara dalam pembiayaan pendidikan, sehingga anggaran yang sebelumnya diperuntukkan bagi sektor ini dapat dialihkan ke bidang lain yang dinilai lebih mendesak. Hal ini terjadi dengan asumsi bahwa pendidikan menyerap banyak dana negara, padahal masih banyak masalah lain di Indonesia yang juga menuntut dukungan anggaran. Akibatnya, pendidikan pun menjadi salah satu sektor yang dikorbankan [18]. Dengan kata lain, deregulasi dan privatisasi dalam dunia pendidikan telah menggeser fungsinya dari instrumen keadilan sosial menjadi barang dagangan dalam pasar, yang lebih mengutamakan efisiensi dan keuntungan finansial daripada pemerataan akses dan nilai-nilai kemanusiaan.

*Kedelapan*, meningkatnya utang mahasiswa (*student loan*). Dalam sistem pendidikan yang mengalami privatisasi dan komersialisasi secara intensif, biaya pendidikan semakin tinggi, sementara kontribusi dana dari pemerintah cenderung mengalami penurunan. Akibatnya, banyak mahasiswa yang harus mengandalkan pinjaman pendidikan agar dapat mengenyam pendidikan tinggi. Di negara-negara yang menerapkan kebijakan neoliberal secara ketat, seperti Amerika Serikat, utang pendidikan telah menjadi persoalan besar berskala nasional, dengan total nilai pinjaman yang mencapai angka triliunan dolar. Di Indonesia, skema pinjaman mahasiswa sebaiknya dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Layanan Umum (BLU) yang khusus menangani hal ini. Dana awal dapat bersumber dari APBN, namun BUMN atau BLU tersebut juga dimungkinkan untuk menghimpun dana dari berbagai sumber seperti hibah, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bantuan internasional, atau sumber dana lainnya. Skema pinjaman dapat dirancang dengan jangka waktu pelunasan tertentu hingga maksimal 25 tahun, dengan sistem pengembalian berbasis bagi hasil atau mengikuti indeks inflasi nasional [19].

Namun secara tidak langsung, model pembiayaan semacam ini justru memperkuat ketimpangan sosial. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah harus berutang untuk bisa belajar, sedangkan mereka yang memiliki kemampuan finansial tetap bisa mengakses pendidikan dengan lebih mudah tanpa beban tambahan. Dalam konteks neoliberal, pendidikan yang seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial justru berpotensi menjadi alat untuk mempertahankan ketimpangan sosial.

Penerapan prinsip-prinsip neoliberal telah menggeser pendidikan dari hak publik menjadi komoditas ekonomi, dengan ciri-ciri seperti marketisasi, tes terstandarisasi, pilihan sekolah, pengurangan pendanaan negara, fokus pada pendidikan kejuruan dan STEM, komodifikasi pengetahuan, deregulasi, privatisasi, serta peningkatan utang siswa. Meskipun bertujuan menciptakan efisiensi dan meningkatkan kualitas dalam penerapannya di Indonesia, penerapan model ini perlu ditinjau ulang agar pendidikan tetap menjadi alat pembebasan dan pemerataan, yang artinya Sebagai alat pembebasan, pendidikan harus menjadi sarana untuk membebaskan peserta didik dari belenggu kemiskinan struktural, ketimpangan akses, serta keterbatasan pengetahuan yang diwariskan oleh ketidakadilan sistemik. Pendidikan juga berperan dalam menciptakan pemerataan, karena melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas, semua lapisan masyarakat terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, maupun geografis memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Ini bertolak belakang dengan pendekatan neoliberal yang menekankan efisiensi dan kompetisi, yang justru memperbesar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Dengan demikian, pendidikan tidak boleh direduksi menjadi sekadar sarana produksi ekonomi, tetapi harus dipahami sebagai ruang transformatif yang membebaskan dan memanusiakan manusia.

### **3. Dampak Negatif Ekonomi Neoliberal terhadap Sistem dan Tata Kelola Pendidikan di Indonesia**

Sebuah bangsa yang memiliki sistem pendidikan yang berkualitas besar kemungkinannya akan menjadi bangsa yang kuat dan memiliki daya saing tinggi. Sebaliknya, bangsa dengan sistem pendidikan yang lemah cenderung kesulitan untuk berkembang dan berkontribusi dalam skala global. Pendidikan yang bermutu memungkinkan suatu bangsa tidak hanya memperbaiki nasibnya sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam perubahan dunia [20]. Terkait dengan hal ini, pengaruh neoliberalisme terhadap pendidikan di Indonesia tidak bisa diabaikan, sebab berbagai aspek seperti marketisasi, komodifikasi, deregulasi, dan privatisasi merupakan bagian dari dampak nyata yang dirasakan. Di sisi lain, ekonomi global yang semakin terbuka dianggap mampu mempercepat dinamika sosial menuju kesejahteraan di negara-negara berkembang.

Namun, kita tidak bisa mengabaikan dampak negatif yang muncul akibat globalisasi ekonomi di Indonesia, sebab fokus utamanya lebih condong pada penekanan biaya produksi serendah mungkin daripada menjaga keseimbangan ekologi, yang kerusakannya tidak menjadi tanggungan finansial bagi perusahaan. Akibat dari kondisi ini, jurang kesenjangan antara kelompok bermodal dan tidak bermodal, serta antara si kaya dan si miskin, menjadi semakin dalam. Menurut Sarbini Sumawinata, dalam sektor ekonomi neoliberal berlaku hukum evolusi Darwin yakni *survival of the fittest*, di mana hanya mereka yang mampu bertahan dalam persaingan global yang akan keluar sebagai “pemenang” dalam kompetisi tersebut.[21].

Untuk mengatasi dampak tersebut, menurut Risqiatul Hasanah dan rekan-rekannya, implikasi yang ditimbulkan dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu kualitas pendidikan, aksesibilitas, aspek sosial-psikologis, serta kesetaraan[22]. *Pertama*, dampak terhadap kualitas pendidikan terlihat dari meningkatnya persaingan antar lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang bersifat komersial cenderung melakukan inovasi untuk menarik peserta didik, misalnya melalui kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, perbaikan fasilitas, serta penggunaan teknologi pembelajaran yang modern. Namun, peningkatan kualitas ini belum tentu menjamin hasil yang optimal bagi semua peserta didik.

*Kedua*, ketimpangan dalam akses pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi hanya dapat dijangkau oleh sebagian kelompok masyarakat, yang pada akhirnya memperbesar jurang antara golongan kaya dan miskin. Di Indonesia, ketimpangan ini tampak nyata antara sekolah-sekolah swasta unggulan dengan fasilitas lengkap dan sekolah-sekolah negeri yang sering kali kekurangan sumber daya. Salah satu dampak paling mencolok dari praktik komersialisasi pendidikan adalah ketidakmerataan akses. Ketika pendidikan menjadi komoditas, hanya mereka yang memiliki kemampuan finansial yang bisa menikmati layanan pendidikan berkualitas. Akibatnya, kesenjangan sosial pun semakin lebar, karena anak-anak dari keluarga kurang mampu terpaksa menempuh pendidikan yang lebih murah dan kualitasnya rendah, sementara anak-anak dari keluarga berada bisa mengakses sekolah-sekolah terbaik dengan fasilitas unggul.

*Ketiga*, terdapat dampak sosial dan psikologis, khususnya bagi siswa dan keluarganya. Tuntutan untuk memperoleh pendidikan terbaik dengan biaya yang tinggi dapat memicu stres dan kecemasan, baik pada siswa maupun orang tua. Di sisi lain, siswa yang tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas kerap merasa tersisih dan kehilangan kepercayaan diri. Kenaikan biaya pendidikan, ditambah dengan berbagai pungutan tambahan, sering memaksa orang tua untuk bekerja lebih keras atau mengorbankan kebutuhan lain demi memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Tekanan semacam ini berdampak pada kesejahteraan

keluarga secara keseluruhan dan, dalam beberapa kasus, dapat menyebabkan anak-anak berhenti sekolah. Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar keadilan sosial dan hak asasi manusia, yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang kondisi ekonomi.

*Keempat*, pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara, justru berubah menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu. Hal ini menyalahi prinsip dasar keadilan sosial dan hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan yang layak, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. *Kelima*, penurunan mutu pendidikan di lembaga-lembaga publik. Ketika institusi pendidikan swasta menawarkan layanan dengan biaya mahal dan fasilitas yang lebih unggul, sekolah-sekolah negeri kerap mengalami penurunan kualitas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya, serta ketidakmampuan untuk bersaing dengan institusi swasta yang memiliki dana lebih besar. Akibatnya, sekolah negeri—yang seharusnya menjadi penopang utama sistem pendidikan nasional—malah tersingkir dan sering dianggap sebagai pilihan terakhir bagi orang tua yang tidak sanggup membiayai pendidikan swasta.[22].

Dengan demikian, ekonomi neoliberal telah memberikan dampak yang kompleks terhadap sistem dan tata kelola pendidikan di Indonesia. Prinsip pasar bebas yang diusung neoliberalisme mendorong pendidikan menjadi komoditas, bukan lagi sebagai hak dasar setiap warga negara. Dalam hal tata kelola, neoliberalisme menyebabkan terjadinya pergeseran peran negara dari penyedia utama layanan pendidikan menjadi fasilitator pasar, di mana banyak kewenangan diserahkan kepada lembaga-lembaga swasta atau didesentralisasikan ke tingkat lokal. Akibatnya, pengambilan keputusan pendidikan tidak lagi terpusat pada negara sebagai penjamin hak publik, melainkan lebih ditentukan oleh logika ekonomi, kepentingan investor, dan mekanisme pasar. Hal ini berdampak pada lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih menekankan pada efisiensi biaya, akuntabilitas kinerja berbasis angka, serta kompetisi antar lembaga, yang secara tidak langsung menggeser nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dari pendidikan itu sendiri. Komersialisasi dan privatisasi menyebabkan ketimpangan akses, di mana hanya kalangan tertentu yang mampu menjangkau pendidikan berkualitas, sementara kelompok ekonomi lemah semakin terpinggirkan. Selain itu, tekanan biaya pendidikan menimbulkan beban sosial dan psikologis bagi keluarga dan peserta didik. Kualitas lembaga pendidikan publik pun mengalami penurunan akibat keterbatasan anggaran dan ketidakmampuan bersaing dengan institusi swasta.

#### 4. Dampak Positif dan Jangka Panjang dari Ekonomi Neoliberal Terhadap Sistem dan Tata Kelola Pendidikan di Indonesia

Penerapan prinsip-prinsip neoliberalisme dalam pendidikan Indonesia membawa dampak besar terhadap sistem dan tata kelola pendidikan. Deregulasi mendorong pelonggaran kontrol negara, sementara privatisasi membuka ruang bagi swasta untuk terlibat lebih dalam dalam pengelolaan pendidikan. Ini menggeser posisi negara dari penyedia utama menjadi fasilitator. Sekolah dan universitas mulai beroperasi layaknya perusahaan, dengan fokus pada efisiensi, daya saing, dan menarik “konsumen” pendidikan. Akibatnya, profesionalisme pendidik dan peran pengelolaan lokal melemah. Sistem akuntabilitas pun berubah, dari yang berbasis tanggung jawab sosial menjadi berbasis angka dan performa. Namun, di balik dampak negatifnya, ada sisi positif yang terlihat. Prinsip transparansi dan efisiensi mendorong pengelolaan pendidikan yang lebih profesional. Penerapan sistem digital seperti e-RKAS dan Dapodik memperkuat akuntabilitas. Desentralisasi juga memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan kebijakan sesuai konteks lokal. Di tingkat perguruan tinggi, model PTNBH memberi otonomi dalam pengelolaan, meskipun tetap menimbulkan tantangan dalam pemerataan. Oleh karena itu, sistem dan tata kelola pendidikan harus tetap diarahkan pada nilai-nilai keadilan sosial dan pembangunan manusia, bukan semata-mata logika pasar.

Meskipun neoliberalisme sering dipandang negatif karena memperburuk ketimpangan dan menjadikan pendidikan sebagai komoditas, sisi positif dari sistem ini juga patut diperhatikan secara objektif. *Pertama*, dari aspek politik pendidikan, keterbukaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan mendorong hadirnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan menjadi bagian dari layanan publik yang bisa dikritisi dan dievaluasi oleh masyarakat luas. Ketika pemerintah berkomitmen menjalankan sistem pendidikan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan publik serta memperkuat rasa nasionalisme, karena pendidikan dilihat sebagai cerminan dari kemajuan bangsa.

Kedua, globalisasi ekonomi sebagai pilar utama dari sistem neoliberal turut mendorong peningkatan kapasitas pendidikan. Terbukanya pasar global dan meningkatnya arus investasi asing memberikan peluang kerja yang lebih luas bagi lulusan. Kondisi ini menuntut lembaga pendidikan untuk terus berinovasi dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan tuntutan global, termasuk penguatan pendidikan vokasi dan penguasaan teknologi. Dorongan pasar juga memacu lembaga pendidikan untuk mencetak lulusan yang tak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kompeten secara profesional.

*Ketiga*, globalisasi turut memfasilitasi transfer teknologi dan aliran modal yang berkontribusi terhadap

percepatan modernisasi fasilitas pendidikan. Investasi asing yang masuk ke sektor pendidikan, baik melalui kerja sama riset, pelatihan pendidik, maupun penyediaan infrastruktur pembelajaran digital, menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia. Bagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih terbatas dalam hal modal dan sumber daya manusia, hal ini menjadi sangat bermanfaat.

*Keempat*, dampak positif dari globalisasi dan neoliberalisme terhadap pendidikan di Indonesia tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Sistem pemerintahan yang semakin terbuka memperkuat akuntabilitas dan partisipasi dalam tata kelola pendidikan, sedangkan tekanan global menstimulasi penyusunan kurikulum yang relevan dengan dinamika dunia. Selain itu, masuknya modal dan teknologi asing turut mendorong modernisasi sarana dan prasarana pendidikan, memperluas akses, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika dikelola dengan baik, potensi ini dapat memperkuat sistem pendidikan nasional yang responsif, kompetitif, dan tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan dan keadilan sosial.[23].

Dampak positif dari globalisasi dan ekonomi neoliberal terhadap pendidikan di Indonesia tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Terbukanya sistem pemerintahan yang demokratis telah memperkuat akuntabilitas dan partisipasi dalam tata kelola pendidikan, sementara globalisasi ekonomi mendorong pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan global. Selain itu, aliran investasi dan teknologi turut mempercepat modernisasi sarana dan prasarana pendidikan, sekaligus memperluas akses serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika dikelola secara tepat, peluang-peluang ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pendidikan nasional yang lebih responsif, kompetitif, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan serta keadilan sosial.

Dalam jangka panjang, penerapan ekonomi neoliberal dalam sistem pendidikan Indonesia berpotensi menciptakan berbagai persoalan struktural yang serius, terutama dalam hal akses, pemerataan, dan keadilan sosial. Ketika pendidikan semakin dikendalikan oleh mekanisme pasar, maka hanya mereka yang memiliki kemampuan ekonomi dan sumber daya yang memadai yang dapat mengakses layanan pendidikan berkualitas. Sementara itu, kelompok masyarakat miskin dan rentan akan semakin terpinggirkan dari kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu.

Model pendidikan yang mengedepankan persaingan dan efisiensi ala pasar juga mendorong munculnya kesenjangan antara sekolah-sekolah elite dengan fasilitas lengkap dan kurikulum unggulan, dengan sekolah-sekolah yang kekurangan dana dan sumber daya, terutama di wilayah-wilayah tertinggal. Anak-anak dari keluarga berada cenderung memiliki

akses terhadap pendidikan yang lebih baik, lingkungan belajar yang mendukung, serta peluang melanjutkan studi hingga ke luar negeri. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali harus menghadapi keterbatasan biaya, infrastruktur, dan kualitas pengajaran, yang pada akhirnya membatasi mobilitas sosial mereka.

Kondisi ini dapat memperkuat lingkaran ketimpangan atau yang dikenal dengan istilah lingkaran setan (*vicious circle*), dimana mereka yang sudah memiliki modal (baik sosial, ekonomi, maupun kultural) akan terus berada di atas, sementara kelompok bawah semakin sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan. Dalam jangka waktu panjang, sistem pendidikan yang timpang ini tidak hanya melahirkan ketidakadilan dalam ranah pendidikan, tetapi juga dapat menciptakan kecemburuan sosial, mengikis solidaritas kebangsaan, serta melemahkan rasa percaya masyarakat terhadap negara sebagai penjamin hak-hak dasar warga.

Lebih dari itu, tekanan ekonomi yang tinggi terhadap keluarga demi membiayai pendidikan dapat berdampak pada munculnya stres sosial, beban psikologis, hingga kasus putus sekolah. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan dan pemutus rantai kemiskinan, justru bisa menjadi instrumen yang memperkuat struktur ketimpangan sosial apabila tidak diimbangi dengan regulasi dan keberpihakan negara terhadap kelompok rentan.

Oleh karena itulah, ekonomi neoliberal dalam pendidikan Indonesia berisiko menimbulkan ketimpangan struktural jangka panjang, terutama dalam akses, pemerataan, dan keadilan sosial. Pendidikan yang dikendalikan pasar cenderung menguntungkan kelompok ekonomi kuat, sementara masyarakat miskin semakin terpinggirkan. Model ini memperlebar kesenjangan antara sekolah elite dan sekolah kurang mampu, membatasi mobilitas sosial anak-anak dari keluarga miskin, dan memperkuat lingkaran kemiskinan. Ketimpangan pendidikan ini juga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, melemahkan solidaritas, serta menggerus kepercayaan pada negara. Jika tidak diimbangi dengan regulasi yang berpihak pada kelompok rentan, pendidikan bisa menjadi alat pelanggeng ketimpangan, bukan pemutusanya.

Secara keseluruhan, pengaruh neoliberalisme terhadap sistem dan tata kelola pendidikan di Indonesia telah mengubah cara pendidikan dijalankan, dikelola, dan diposisikan dalam masyarakat. Pergeseran dari pendekatan sentralistik ke desentralistik membawa dampak positif berupa peningkatan otonomi dan fleksibilitas, namun juga menyisakan tantangan besar seperti ketimpangan kapasitas antar daerah dan lembaga. Peran negara yang semakin terbatas dalam pembiayaan dan pengawasan membuka ruang bagi swasta, namun turut memperkuat komersialisasi pendidikan. Lembaga pendidikan kini dituntut tidak hanya untuk mendidik, tetapi juga mengelola sumber

daya, bersaing dalam mutu layanan, dan memenuhi target kinerja yang terukur. Oleh karena itu, tata kelola pendidikan di era neoliberal perlu diarahkan agar tetap menjunjung nilai-nilai keadilan sosial, keberpihakan kepada kelompok rentan, serta penguatan akuntabilitas yang berpihak pada kualitas pendidikan, bukan sekadar efisiensi pasar.

## KESIMPULAN

Penerapan ekonomi neoliberal dalam sistem pendidikan Indonesia telah membawa dampak yang kompleks dan beragam. Di satu sisi, model ini mendorong efisiensi, inovasi, dan modernisasi dalam tata kelola pendidikan melalui kompetisi, adaptasi kurikulum global, serta aliran investasi dan teknologi. Namun, di sisi lain, pendekatan ini juga menyebabkan persoalan struktural yang serius, terutama dalam hal akses, keadilan sosial, dan pemerataan pendidikan. Pendidikan yang dipandang sebagai komoditas pasar cenderung menguntungkan kelompok masyarakat berdaya ekonomi tinggi, sementara kelompok rentan semakin terpinggirkan. Ketimpangan antara sekolah elite dan sekolah kurang mampu semakin melebar, membatasi mobilitas sosial, dan memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Selain itu, tekanan biaya pendidikan menciptakan beban sosial dan psikologis yang signifikan bagi keluarga, serta mengancam peran negara sebagai penjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pendidikan berbasis neoliberal dan menyeimbangkannya dengan regulasi yang menjamin keberpihakan pada kelompok miskin dan rentan. Pendidikan harus dikembalikan pada fungsinya sebagai alat pemberdayaan dan pemutus rantai kemiskinan, bukan sebagai sarana pelanggeng ketimpangan sosial semata. Dengan tata kelola yang adil dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, sistem pendidikan Indonesia dapat menjadi fondasi pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Salim, J. Manubey, and D. Kuswandi, "Neoliberalisme dan Komersialisasi Pendidikan di Indonesia: Sebuah Refleksi," *Jurnal Pendidikan*, vol. 24 no. 2, pp. 98, 2024, doi: 10.52850/jpn.v24i2.12484.
- [2] R. Riyanti and Miswar, "Pentingnya Deregulasi Terhadap Neoliberalisme sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia," *Jurnal Pahlawan*, vol. 7 no. 2, pp. 2, 2024, doi: 10.31004/jp.v7i2.42723.
- [3] I. Muhsin, "Mensiasati Ideologi Neoliberal dalam Pendidikan," *Journal UII*, vol. 31 no. 67, pp. 2, 2018, doi: 10.20885/unisia.v31i67.170.
- [4] Baltodano, *Neoliberalism and the demise of public education: the corporatization of schools of education*. Routledge, 2023.
- [5] J. Tucker and M. Fushell, "Neoliberal Influences: The Aftermath of Educational Reform- A Reflective Analysis," *International Journal of Educational Reform*, vol. 30 no. 4, pp. 363, 2021, doi: 10.1177/1056787921998342.



- [6] A. Azra, *Pendidikan Islam: Trasisi dan modernisasi menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- [7] M. Y. A. Bakar, "Pengaruh Paham Liberalisme dan Neoliberalisme Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia," *Tsaqafah : Jurnal Peradaban Islam*, vol. 8 no. 1, pp. 137, 2015, doi: 10.21111/tsaqafah.v8i1.22.
- [8] M. I. Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penulisan dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- [9] M. F. Ferdino, A. Razzaq, and K. Imron, "Konsep Moderasi Beragama Pada Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 143," *Jurnal Ilmiah Global Education*, vol. 5 (3), pp. 1501, 2024.
- [10] J. Teehankee, *Equity and Justice in a Globalized World: A Liberal Review*. [Online]. Available: <http://www.fnf.phlseminars/reports/equity-justice-in-globalized-worldreview.%0Ahtm>
- [11] Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- [12] R. A. . Wattimena, *Mendidik Sikap Kritis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- [13] L. D. T. Jr, "Neoliberal Consequence: Data-driven decision making and the subversion of student success efforts," *The Review of Higher Education Journal*, vol. 43 no. 4, pp. 363, 2020, doi: 10.1353/rhe.2020.0031.
- [14] M. Musayyidi, "Menyoal Komersialisasi Pendidikan di Indonesia," *Kariman : Jurnal Pendidikan Keislaman*, vol. 8 no. 1, pp. 129, 2020, [Online]. Available: 10.52185/kariman.v8i1.134
- [15] Nisrokha, "Tes Terstandarisasi," *Jurnal Madaniyah*, vol. 10 no. 1, pp. 26, 2020.
- [16] H. M. Precalya, "Liberalisme Pendidikan dan Wacana Link and Match Sekolah Kejuruan di Indonesia," *Jurnal Basicedu*, vol. 6 no. 4, pp. 6584, 2022, doi: 10.31004/basicedu.v6i4.3310.
- [17] I. Wahyudi, "Komersialisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia," *Tawazun : Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 8 no. 1, pp. 57, 2015, doi: 10.32832/tawazun.v8i1.1132.
- [18] N. K. Daulay, "Masalah dan Tantangan Privatisasi Pendidikan Tinggi," *Jurnal Tarbiyah*, vol. 21 no. 2, p. 363, 2015, doi: 10.30829/tar.v21i2.226.
- [19] S. Nahdi, H. Amalika, H. Azzahra, and W. F. Nurcahya, "Studi Komparatif Student Loan Australia, Amerika dan Swedia Serta Potensi Penerapannya di Indonesia," *Journal of Macroeconomics and Social Development*, vol. 1 no. 4, pp. 16, 2024, doi: 10.47134/jmsd.v1i4.318.
- [20] Muhammad Sirozi, *Konteks & Kerangka Konseptual Kajian Politik Pendidikan*. Palembang: Noerfikri Offset, 2013.
- [21] S. Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- [22] R. Hasanah, M. Iqbal, and I. Noor, "Komersialisasi Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Dakwah di Era Teknologi," *Bayan Lin Naas : Jurnal Dakwah Islam*, vol. 8 no. 2, p. 44, 2024, doi: 10.28944/bayanlin-naas.v8i2.1900.
- [23] F. D. Widiarti, "Dampak Globalisasi di Negara Indonesia," *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, vol. 2 no. 1, pp. 81–83, 2022, doi: 10.38156/jisp.v2i1.122.